

**KELOMPOK KAJIAN
PERLINDUNGAN
SOSIAL DAN TENAGA
KERJA**

Muhammad Hanri
hanri@lpem-feui.org

Nia Kurnia Sholihah
nia.kurnia@lpem-feui.org

Faizal Rahmanto Moeis
faizalmoeis@lpem-
feui.org

DAFTAR ISI

Rencana Transisi PKH
Graduasi Menjadi Program
Kewirausahaan Sosial
(ProKUS) – 1

Captive Market ProKUS – 2

ProKUS dan Pengembangan
Akses Kredit – 4

RINGKASAN

Upaya pemerintah untuk mendorong kemandirian masyarakat tercermin melalui penyusunan program bantuan yang lebih produktif dalam rangka mendukung graduasi penerima bantuan tersebut. Salah satu program yang diusung oleh pemerintah adalah Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS) yang memberikan tambahan modal kerja bagi KPM PKH yang memiliki usaha rintisan. Selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan, diharapkan program ini akan mampu meningkatkan kemampuan peserta untuk mengakses berbagai program kredit yang tersedia terutama untuk usaha mikro agar peningkatan kapasitas usaha dapat dilakukan, yang bermuara kembali pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat.

Rencana Transisi PKH Graduasi Menjadi Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS)

Perlindungan sosial sudah lama menjadi salah satu program prioritas pemerintah Indonesia terutama dalam upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Salah satu dari bentuk perlindungan sosial adalah pemberian bantuan produktif kepada kelompok masyarakat miskin dan rentan melalui berbagai skema yang disesuaikan dengan latar belakang sosial ekonomi dari sasaran program tersebut.

Pemerintah juga mendorong adanya graduasi dari penerima bantuan. Hal ini bertujuan agar masyarakat lebih mandiri secara ekonomi. Bentuk dukungan pemerintah diberikan dengan tidak lagi memberi bantuan (bersyarat maupun tidak bersyarat), tetapi lebih kepada bantuan yang bersifat modal untuk keperluan produktif, diikuti dengan pendampingan dan pelatihan yang sesuai.

Salah satu dari bentuk program pemerintah adalah Program Kewirausahaan Sosial (ProKUS). Program ini dimulai pada tahun 2020 melalui Kementerian Sosial. Program ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan kelompok penerima manfaat (KPM) dari kategori miskin desil 1 dan 2 agar dapat masuk ke desil di atasnya. ProKUS lebih difokuskan untuk KPM PKH graduasi guna menguatkan ekonomi keluarga.

Pada tahap awal pelaksanaan, program dilakukan di 5 kabupaten/ kota antara lain: Kab. Bantul, Kab. Semarang, Kab. Majalengka, Kab. Bandung Barat dan DKI Jakarta. Berikutnya, ProKUS dikembangkan secara lebih luas dan menjadi program prioritas nasional. Pada tahun 2020 target sasaran adalah 1.000 KPM, sedangkan pada tahun 2021 target sarannya meningkat menjadi 7.000 KPM serta didampingi oleh 26 lembaga inkubator bisnis. Selanjutnya, pada tahun 2022 target sarannya kembali ditingkatkan menjadi sebanyak 10.000 KPM.

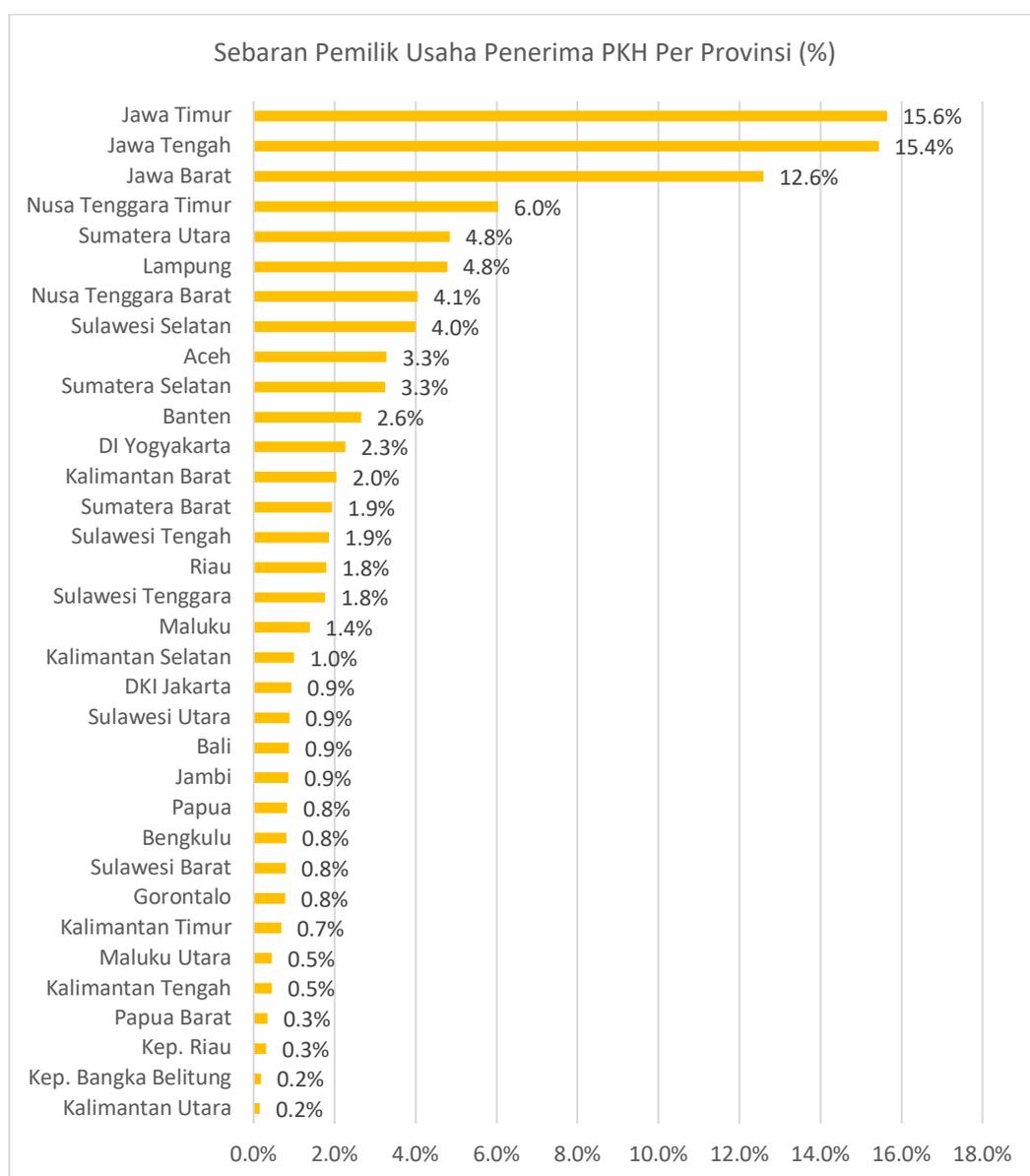
Adapun KPM ProKUS merupakan peserta aktif Program Keluarga Harapan (PKH) yang mempunyai usaha. Program ini sejatinya juga menjadi respons atas adanya pandemi Covid-19 karena salah satu prioritasnya adalah ditujukan untuk rintisan usaha yang terdampak pandemi. Penerima ProKUS yang terseleksi akan menerima bantuan sosial berupa modal usaha sebesar Rp3,5 juta per KPM. Penerima ProKUS tidak hanya mendapatkan bantuan modal usaha tetapi juga pendampingan. Diharapkan, dengan bantuan dan pendampingan ini, KPM dari kelompok masyarakat pra-sejahtera semakin mandiri secara ekonomi.

Di samping itu, terdapat beberapa jenis usaha yang menjadi fokus dalam pengembangan ProKUS, di antaranya adalah kelontong, kuliner, pedagang, penjahit, pertanian, dan peternak. Dengan fokus pemberian ProKUS pada KPM yang sudah memiliki usaha rintisan, maka tujuan program ini untuk peningkatan kapasitas KPM dalam menjalankan usahanya akan dapat tercapai.

Captive Market ProKUS

Dengan adanya rencana integrasi graduasi PKH ke ProKUS, usaha yang sudah dimiliki oleh penerima PKH dapat dikembangkan untuk keberlanjutan pendapatan rumah tangga untuk mencapai kondisi sosio-ekonomi di atas kemiskinan dan rentan miskin. Namun, perlu dilakukan analisis terkait pasar dari calon penerima ProKUS pada penerima PKH. Dari data Susenas Maret 2021, 58,8% rumah tangga penerima PKH paling tidak memiliki satu anggota rumah tangga yang mempunyai usaha. Hal ini menunjukkan bahwa ProKUS memiliki pasar yang cukup besar di kalangan penerima PKH. Kemudian, dari segi regional, mayoritas usaha penerima PKH berada di Pulau Jawa (49,5% dari total usaha penerima PKH), dengan usaha terbanyak berada di Jawa Timur (15,6% dari total usaha penerima PKH). Hal ini diikuti Pulau Sumatera (22,1%) dan Pulau Bali dan Nusa Tenggara (11,0%). Usaha penerima PKH paling sedikit berada di Pulau Maluku dan Papua (3,0%).

Kondisi ini dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah Indonesia untuk melakukan evaluasi kebijakan terkait dengan pekerja perempuan dan tunjangan maternitas. Salah satu hal yang dapat dipertimbangkan adalah perluasan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan untuk segmen tersebut, misalnya melalui program JKP yang cakupannya diperluas ke segmen BPU dan untuk perempuan hamil.

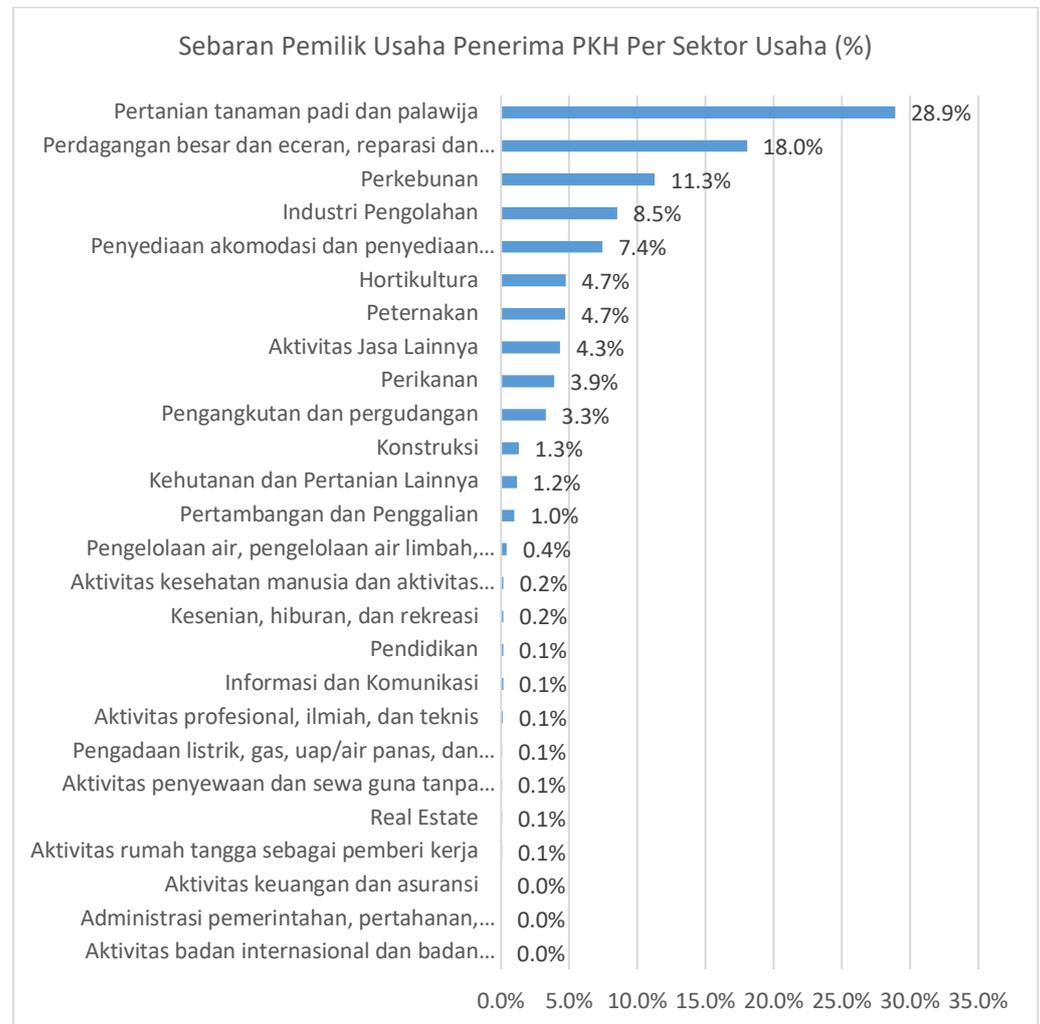


Gambar 1. Sebaran Pemilik Usaha Penerima PKH Berdasarkan Provinsi

Sumber: SUSENAS 2021, diolah

Dari segi sektor usaha, usaha pertanian mendominasi sektor dari usaha penerima PKH, di mana 54,6% dari usaha penerima PKH berasal dari sektor pertanian dengan sektor pertanian tanaman padi dan palawija sebagai sektor yang terbesar dari usaha penerima PKH (28,9%). Hal ini diikuti dengan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan sepeda motor (18,0%) dan sektor perkebunan (11,3%). Dengan kondisi usaha yang mayoritas berada di sektor primer, ProKUS memiliki potensi untuk mengembangkan usaha primer dari penerima PKH agar memiliki nilai tambah yang lebih tinggi. Selain itu, usaha di

sektor sekunder dan tersier dapat terbantu melalui peningkatan *exposure* usaha maupun dukungan perizinan yang menjadi bagian dari program ProKUS.



Gambar 2. Sebaran Pemilik Usaha Penerima PKH Berdasarkan Sektor

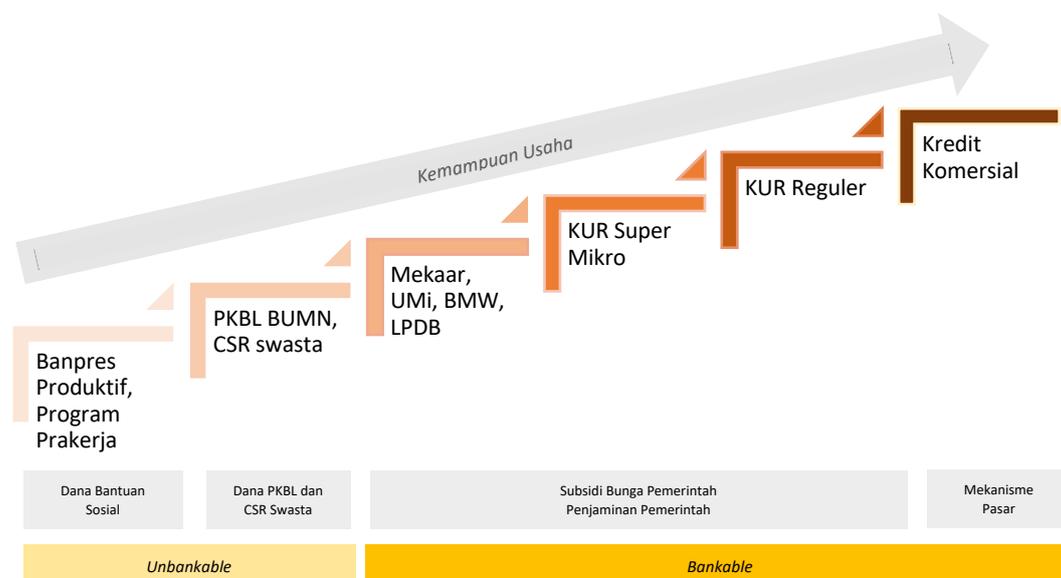
Sumber: SUSENAS 2021, diolah

ProKUS dan Pengembangan Akses Kredit

ProKUS berpotensi mengembangkan akses kredit bagi usaha penerima PKH untuk meningkatkan skala usaha. Pada Maret 2021, hanya 30% dari usaha penerima PKH yang memiliki akses kredit (baik formal maupun informal). Dengan pengembangan skala usaha, maka penerima ProKUS diharapkan sudah bisa lebih *bankable*, sehingga dapat mengakses kredit-kredit mikro seperti KUR, PIP, UMi, dll.

Pemerintah Indonesia sudah memiliki beberapa skema pembiayaan usaha untuk usaha mikro yang disesuaikan dengan kapasitas usaha itu sendiri. Secara umum jika dilihat dari apakah usaha tersebut *unbankable* atau *bankable*, pemerintah memiliki beberapa kredit program yang bisa diakses. Untuk kelompok *unbankable*,

pemerintah memiliki program Kartu Pra-Kerja dan Banpres Produktif. Selain itu, juga terdapat Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) BUMN serta CSR dari swasta yang bisa diakses oleh kelompok ini.



Gambar 3. Berbagai Akses Permodalan UMKM

Sumber: Diadaptasi dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2022

Terdapat beberapa program kredit yang dapat diakses oleh KPM ProKUS yang masuk dalam kategori *bankable*. Yang pertama adalah kredit UMi yang diselenggarakan di bawah BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebagai koordinator. Program ini berasal dari dana APBN yang disalurkan melalui lembaga keuangan bukan bank (LKBB) seperti PT Pegadaian, PT PMN dan PT Bahana Artha Ventura (BAV). Adapun besaran plafon untuk program ini adalah Rp 10 juta dengan jangka waktu pinjaman kurang dari 52 minggu. Besaran bunga yang harus dibayarkan oleh peminjam tergantung pada lembaga penyalur, sedangkan pemerintah memberikan pinjaman kepada penyalur dengan bunga sebesar 2-4%. UMKM yang hendak mengakses program ini harus tercatat dalam Sistem Informasi Kredit Program dan tidak sedang dibiayai kredit program pemerintah di bidang UMKM lainnya. Dalam program UMi, pembiayaan kelompok tidak dibebankan agunan.

Selain program tersebut, KPM ProKUS juga dapat mengakses program kredit dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir yang dikoordinir oleh BLU PDB di bawah Kementerian Koperasi dan UKM. LPDB menyalurkan dananya melalui koperasi dengan besaran plafon untuk koperasi minimal Rp 250 juta dan untuk UMKM minimal Rp 150 juta. Tenor untuk pinjaman ini adalah maksimal 5 tahun termasuk masa tenggang bagi peminjam permodalan serta maksimal 10 tahun termasuk masa tenggang bagi peminjam investasi. Besaran bunga yang dibebankan adalah 8%,

tetapi sejak pandemi menjadi disubsidi menjadi sebesar 3%. Program ini ditujukan kepada koperasi serta UKM strategis dan prioritas pemerintah.

Di sisi lain, KPM ProKUS juga memiliki opsi untuk mengambil pinjaman dari PT PNM yang mengembangkan program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera). Mekaar merupakan pinjaman langsung kepada usaha dengan plafon Rp 100 juta. Program ini ditujukan untuk nasabah perempuan yang diwajibkan membentuk kelompok minimal 10 orang. Program ini memiliki prinsip tanggung renteng dengan tenor 50 minggu. Calon nasabah tidak dikenakan syarat agunan.

Dengan semakin berkembangnya usaha KPM ProKUS, maka opsi pembiayaan yang dapat diakses berikutnya adalah Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program ini memiliki beberapa skema, yaitu KUR Super Mikro, KUR Mikro, dan KUR Kecil. Yang membedakan dari ketiga program tersebut adalah besaran plafon pinjaman, yaitu masing-masing sampai dengan Rp 10 juta, Rp 10-50 juta, dan Rp 20-500 juta. Adapun bunga setelah subsidi dari pemerintah dibebankan sebesar 6%. Untuk KUR Super Mikro, debitur tidak ada syarat agunan tambahan, tetapi disyaratkan belum pernah menerima KUR serta mengikuti pendampingan dan pelatihan jika pendirian usahanya kurang dari 6 bulan.

Tentunya terdapat juga pembiayaan berupa kredit komersial dari berbagai lembaga keuangan bagi usaha yang berkembang dan membutuhkan pembiayaan lebih besar. Selain kredit komersial, terdapat juga pembiayaan dalam bentuk lain seperti melalui pembiayaan melalui *fintech*. Dengan demikian, ProKUS diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong awal bagi KPM yang merintis usaha untuk dapat mengembangkan usahanya.

